

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat kompleks dan multidimensial yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Adapun masalah kemiskinan umumnya terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dengan adanya masalah kemiskinan, pembangunan dalam suatu negara akan terhambat sehingga tujuan dan cita-cita suatu negara tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik.

Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2017 menyatakan masalah kemiskinan paling besar terjadi di pedesaan. Semakin jauh dan terpencil lokasi sebuah desa dari kota, maka akan semakin sulit bagi penduduk desa tersebut untuk mendapatkan barang dengan harga yang murah. Sementara sumber daya ekonomi yang ada di wilayah tersebut juga sangat terbatas. Hal ini menyebabkan tingkat kesejahteraan di wilayah desa atau pinggiran tidak mengalami peningkatan (Sunariyah, 2017).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Maret 2015, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dalam bentuk kebijakan berupa program perlindungan sosial seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). PKH bukanlah kelanjutan dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) tetapi merupakan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan dimana ditujukan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan persyaratan yang dikaitkan dengan upaya peningkatan SDM dalam bidang pendidikan, kesehatan dan gizi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup serta memutuskan rantai kemiskinan antar generasi pesertanya. Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial sejak tahun 2007 dan cukup berhasil di beberapa negara yang dikenal sebagai bantuan tunai bersyarat (Kemensos RI, 2008: 1).

Program sebelumnya seperti, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyetaraan harga BBM. Hal ini berbeda dengan PKH, lebih dimaksudkan pada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin (Hermawati dalam Rachman, 2015: 6).

Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Secara khusus, tujuan PKH adalah: (1) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH; (2) Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH; (3) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota

Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM) (Kemensos RI,2013: 14).

Jumlah penduduk miskin provinsi Sumatera Utara berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2015 sebanyak 1.508.100 jiwa. Pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 1.455.900 jiwa. Kabupaten Langkat sebagai salah satu kabupaten di Sumatera Utara juga menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Langkat 2016 jumlah penduduk miskin Kabupaten Langkat dari tahun 2011 sampai 2015 berubah-ubah hingga mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2015. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Langkat tahun 2011 sebanyak 100.800 jiwa dengan persentase 11,31%; tahun 2012 sebanyak 99.270 jiwa dengan persentase 11,02%; tahun 2013 sebanyak 104.310 jiwa dengan persentase 10,44%; tahun 2014 sebanyak 100.630 jiwa dengan persentase 10,39% dan tahun 2015 sebanyak 114.190 jiwa dengan persentase 11,03%.

Kabupaten Langkat mengajukan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2014, sedangkan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Langkat tahun 2015. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pihak UPPKH (Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan) Kabupaten Langkat, terdapat lima kecamatan yang memiliki jumlah terbesar keluarga yang masuk kedalam kategori Keluarga Sangat Miskin (KSM) diantaranya adalah Kecamatan Tanjung Pura (3.247 KSM), Secanggang (3.203 KSM), Babalan (2.475 KSM), Stabat (2.161 KSM) dan Hinai (2.142 KSM). Kemiskinan di Kabupaten masih didominasi kemiskinan di daerah pedesaan, termasuk Kecamatan Hinai. Kecamatan Hinai merupakan salah satu dari lima kecamatan dengan jumlah KSM

terbanyak di Kabupaten Langkat sehingga pengimplementasian Program Keluarga Harapan (PKH) perlu dilakukan di kecamatan ini dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan bahkan dapat memutuskan rantai kemiskinan (UPPKH Hinai, 2017).

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan di daerah penelitian, tingginya antusias masyarakat untuk menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial antara masyarakat yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan masyarakat yang bukan peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu ada pula beberapa masyarakat menyatakan bahwa terdapat peserta Program Keluarga Harapan yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini menimbulkan dugaan di kalangan masyarakat setempat bahwa penyaluran dana PKH di Kecamatan Hinai belum tepat sasaran. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa implementasi Program Keluarga Harapan belum sesuai prosedur.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) berlangsung sejak tahun 2015. Meskipun baru berlangsung selama dua tahun, namun program ini tentu sudah bisa dievaluasi dimana dalam mengevaluasi program ini diperlukan respon masyarakat yang mencakup persepsi, sikap, dan partisipasi terhadap Program Keluarga Harapan (PKH). Respon masyarakat dibutuhkan dalam merancang implementasi Program Keluarga Harapan yang berorientasi sesuai harapan dan kepuasan rumah tangga sasaran yang dapat dinilai dari perbandingan kinerja PKH dengan harapan terhadap PKH. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan efektivitas Program Keluarga Harapan dimasa yang akan datang. Sehingga manfaat PKH ini benar-benar dapat dirasakan oleh rumah tangga sasaran dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan perlu dilakukan kajian mendalam untuk mengetahui apakah implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Hinai telah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang tertuang didalam buku Pedoman Program Keluarga Harapan (PKH) serta melihat bagaimana respon masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) setelah program ini diimplementasikan. Oleh sebab itu, dilakukan penelitian mengenai “Implementasi dan Respon Masyarakat Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat”.

### **B. Identifikasi Masalah**

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini diperoleh dari uraian latar belakang masalah yaitu:

1. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Langkat yang mengalami peningkatan cukup signifikan tahun 2015.
2. Kecamatan Hinai merupakan salah satu dari lima kecamatan di Kabupaten Langkat yang memiliki Keluarga Sangat Miskin (KSM) terbanyak sehingga Program Keluarga Harapan (PKH) dianggap tepat untuk diimplementasikan di Kecamatan Hinai.
3. Terjadi kecemburuan sosial antara masyarakat peserta Program Keluarga Harapan dengan masyarakat bukan peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
4. Penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Hinai belum tepat sasaran.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu penetapan

Rumah Tangga Sasaran (RTS), pertemuan awal dan validasi, penyaluran bantuan, dan komitmen fasdik dan faskes dan respon masyarakat (kognitif, afektif, dan behavioral) terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini,yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis : menambah wawasan penulis dalam menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi, sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), dan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti objek yang sama dan di lokasi yang berbeda.
2. Manfaat Praktis : sebagai masukan kepada masyarakat bahwa kemiskinan harus diberantas karena ini masalah yang sangat kompleks dan turun temurun;

Sebagai masukan bagi pendamping UPPKH untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah dibuat; sebagai masukan bagi pemerintah untuk melihat bagaimana jalannya Program Keluarga Harapan (PKH) dari respon peserta PKH sehingga dapat dilakukan peningkatan kinerja dalam pengimplementasian PKH agar manfaat dari PKH benar-benar dapat dirasakan rumah tangga sasaran dalam upaya pengentasan kemiskinan.